

PERAN PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP PERWUJUDAN KOTA LAYAK ANAK DI PEDURUNGAN KIDUL, KOTA SEMARANG*

Oleh: Ngatmini, Suyitno, Adi Susanto, Cahyo Wahyu Utomo**

Abstraks

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah kondisi pengentasan warga miskin yang ada di kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang ? 2) Bagaimanakah implementasi kota layak anak di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang ? 3) Bagaimanakah daya dukung pengentasan kemiskinan terhadap terwujudnya kota layak anak di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang?

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Populasi warga miskin yang terentaskan di 12 RW. Variabel penelitian tentang pengentasan kemiskinan dan kota layak anak. Instrumen yang digunakan berupa : angket, dokumen, wawancara. Analisis datanya dengan analisis interaktif.

Simpulan yang diperoleh :1. Di Kelurahan Pedurungan Kidul, usaha pengentasan kemiskinan belum berhasil, karena kriteria miskin masih beragam. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian secara seksama dengan kriteria yang jelas tentang definisi miskin. 2. Perwujudan kota layak anak belum berhasil karena aparat dan warga belum tahu istilah kota layak anak. Kondisi warga miskin lebih berpikir untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Walaupun demikian sudah ada kesadaran akan pentingnya pendidikan anak, pemberian fasilitas belajar, perhatian terhadap belajarnya, pelayanan anak dalam belajar demi masa depan. 3. Daya dukung pengentasan kemiskinan terhadap perwujudan kota layak anak di Kelurahan Pedurungan Kidul belum diketahui secara jelas karena istilah kota layak anak belum diketahui. Di samping itu hasil pengentasan kemiskinan belum dapat diketahui karena kriteria miskin masih bias. Jika dilihat dari kriteria pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan sekolah dasar, maka warga miskin belum terentaskan. Namun indikator ke arah perwujudan kota layak anak sudah ada pada warga, mereka ingin memberi bekal pendidikan pada anaknya untuk masa depannya, agar mereka memiliki kepribadian, bermoral, dan mandiri.

Kata Kunci : pengentasan kemiskinan, kota layak anak

Abstract

The problem in this study were 1) How to alleviate the poor conditions that exist in the village Pedurungan Kidul, Semarang City? 2) How is the implementation of child-friendly cities in the Village Pedurungan Kidul, Semarang City? 3) What is the carrying capacity of reducing poverty to the establishment of child-friendly cities in the Village Pedurungan Kidul, Semarang City?

The method of research used qualitative research methods-descriptive. The population of poor people in 12 terentaskan RW. Variables research on poverty and child-friendly city. The instruments used include: questionnaires, documents, interviews. Data analysis with interactive analysis.

The conclusions were obtained: 1. In the Village Pedurungan Kidul, poverty reduction has not been successful, because the poor are still a variety of criteria. In this case, the research needs to be done carefully with clear criteria for the definition of poor. 2. City embodiment eligible children have not been successful because the authorities and the citizens do not know the term

child-friendly city. The condition of the poor more thinking to meet their basic needs. Nevertheless, existing awareness of the importance of education, provision of learning facilities, attention to learning, service learning for children in the future. 3. The carrying capacity of the city to the realization of poverty reduction in Sub Pedurungan eligible children Kidul not known for certain because the term child-friendly city is unknown. In addition, the results of poverty reduction can not be known because of poor criteria are biased. When viewed from the criteria needs of food, clothing, housing, and basic needs of the school, then the poor have not terentaskan. However, indicators of the direction of the city embodiment eligible children already exist in the community, they want to give to the education of their children for the future, so that they have a personality, virtuous, and independent.

Keywords: poverty, child-friendly city

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam pembangunan, karena salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah mengurangi kemiskinan. Kemiskinan sebagai masalah serius dalam proses pembangunan bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang telah ikut menyepakati deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs), yang salah satu tujuannya adalah memberantas kelaparan dan kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi sasaran program. Hal ini dapat dilihat pada pemerintah yang menggulirkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Selain itu masih terdapat kontroversi mengenai realitas kemiskinan yang terus mengemuka.

Sementara makna pembangunan bergeser dari orientasi pada laju pertumbuhan menuju pemerataan hasil pembangunan. Pemikiran bahwa dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan pendapatan perkapita naik, maka masalah pengangguran dan kemiskinan dapat terpecahkan. Namun kenyataannya meningkatnya laju pertumbuhan dibarengi bertambahnya pengangguran dan kemiskinan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakberuntungan situasi atau dapat juga kemiskinan itu sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan.

Penyebab apapun kemiskinan itu, pemerintah telah banyak meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Inpres Desa Tertinggal, Program tabungan Kesejahteraan Rakyat Kredit Usaha untuk Kesejahteraan Rakyat (Takesra- Kukesra),

program penanggulangan Dampak krisis Ekonomi (PDM-DKE), program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Begitu juga adanya Program Subsidi langsung Tunai /Bantuan Langsung Tunai(SLT-BLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Semua bentuk program tersebut sebagai usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Namun, program tersebut terdapat kelemahan, belum optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin, sehingga terkesan dana bantuan sebagai ‘belas kasihan’ atau ‘dana bantuan cuma-cuma’. Demikian juga program pemerintah tersebut belum memberdayakan masyarakat secara terpadu.

Di wilayah perkotaan dengan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) memiliki pendekatan integratif. Melalui Program P2KP terjadi proses pembelajaran dan penguatan kesadaran kritis masyarakat karena program ini berupaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk gerakan bersama dalam komunitas.

Pembangunan pada suatu negara diawali dengan pembangunan wilayah yang lebih rendah, seperti tingkat propinsi, kota/kabupaten, kecamatan, atau kelurahan. Pada penelitian ini akan mengungkap keadaan kemiskinan yang ada pada kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang. Penelitian ini akan mendapatkan gambaran apakah program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan sudah berhasil membawa perubahan pada warga miskin.

Upaya pengentasan kemiskinan mendasarkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Usaha pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah belum menyentuh pemberdayaan masyarakat. Demikian juga di Kelurahan Pedurungan Kidul usaha pemerintah masih bersifat sinterklas, sehingga menjadikan kelompok miskin menjadi malas kerja bahkan hal ini seakan melanggengkan kemiskinan. Seperti yang dikatakan Gumilar (2007: 12) pemberian berbagai bantuan keuangan atau barang langsung justru berdampak melanggengkan kemiskinan. Sementara pihak Aparat kelurahan belum mengambil kebijakan kecuali menunggu program pemerintah yang lebih tinggi. Pengentasan kemiskinan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun masyarakat sekitar dapat melakukan upaya membantu masyarakat miskin sesuai dengan kemiskinan yang dialami masyarakat di sekitarnya dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu setelah diketahui hasil dari temuan ini akan ditindaklanjuti model yang dapat

digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat. Dari kondisi awal ini dapat dikatakan ada minat masyarakat untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayahnya. Yang hal tersebut sebenarnya akan mewujudkan tercapainya program kota layak anak.

Kondisi masyarakat miskin akan mempengaruhi kehidupan keluarga, penyediaan makanan, perlakuan terhadap anak serta pola pendidikannya. Hal ini berhubungan dengan program kota layak anak. Kota layak anak sudah dikembangkan ke daerah secara luas. Kota layak anak memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam proses berkelanjutan. Model kota layak ini akan dimiliki dan dikembangkan oleh warga ketika kondisi mereka tercukupi. Manakala kebutuhan itu belum tercukupi maka anak yang belum saatnya kerja sudah diminta membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sehubungan dengan hal itu akan diteliti kondisi masyarakat Kelurahan Pedurungan Kidul kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan kaitannya dengan implementasi kota layak anak.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah kondisi pengentasan warga miskin yang ada di kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang ?
- b. Bagaimanakah implementasi kota layak anak di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang ?
- c. Bagaimanakah daya dukung pengentasan kemiskinan terhadap terwujudnya kota layak anak di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang?

2. Tinjauan Pustaka

a. Kemiskinan

Penghapusan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia. Komitmen bangsa-bangsa untuk menghapus kemiskinan dari muka bumi ditegaskan dan dikokohkan dalam “ Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan”. Indonesia termasuk satu negara yang

menyepakati deklarasi tersebut. Pemerintah Indonesia sepakat menempuh langkah pengentasan kemiskinan sebagai berikut : antara lain (ada 13 langkah)

- 1) Membentuk dana solidaritas dunia untuk menghapuskan kemiskinan dan memajukan pembangunan sosial dan manusia Indonesia;
- 2) Mengembangkan program nasional bagi pembangunan berkelanjutan dan pengembangan masyarakat daerah lokal dalam lingkup strategi nasional pengurangan kemiskinan, meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat miskin serta organisasi kelompok masyarakat tersebut;
- 3) Menyediakan pelayanan kesehatan dasar untuk semua kelompok masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap kesehatan yang berasal dari lingkungan;
- 4) Menjamin bahwa anak-anak di manapun juga, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar serta memperoleh akses dan kesempatan yang sama pada semua tingkatan pendidikan;
- 5)(Hadad, 2003)

b. Pendekatan Kemiskinan

Ada lima pendekatan dalam memahami kemiskinan, yaitu :

- 1) Pendekatan pendapatan, yaitu seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya berada di bawah tingkat minimal yang layak.
- 2) Pendekatan kebutuhan dasar, yaitu seseorang dikatakan miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, sandang, papan, sekolah dasar.
- 3) Pendekatan aksesibilitas, yaitu seseorang dikatakan miskin jika kurang akses terhadap asset produktif, infrastruktur sosial dan fisik, informasi, pasar dan teknologi.
- 4) Pendekatan kemampuan manusia, yaitu seseorang dikatakan miskin apabila yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang dapat berfungsi pada tingkat maksimal.
- 5) Pendekatan ketimpangan, yaitu seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan yang bersangkutan berada di bawah kelompok masyarakat dalam komunitasnya (pendekatan kemiskinan relatif).

c. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan kompleks, oleh karena itu pengertian kemiskinan sangat beragam sesuai dengan evolusi ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu sosial. Definisi kemiskinan yang mengikuti pemikiran konvensional adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Definisi tersebut meluas dengan terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tertier yang terus meningkat. Kemiskinan merupakan persoalan individu yang disebabkan oleh kelemahan atau dan pilihan individu yang bersangkutan (pendukung Neo-Liberal) (<http://www.policy.hu/suharto/modul/makindo/13htm>). Sementara kelompok pendukung teori Sosial Demokrat mengatakan bahwa kemiskinan bukan merupakan persoalan individual, melainkan merupakan persoalan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan.

Pendukung Teori Neo-Liberal berpendapat bahwa kemiskinan akan hilang apabila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Oleh karena itu Strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat 'residual' hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga keagamaan. Pemerintah dalam hal ini tidak dapat berperan kecuali mereka sudah tidak mampu melaksanakan kegiatannya. Sedangkan pendukung teori Sosial Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan kesetaraan penting dalam memperoleh kemandirian kebebasan. Terwujudnya kebebasan hanya dapat dicapai apabila setiap orang memiliki atau menjangkau sumber-sumber. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat.

Dengan demikian kemiskinan dari sudut pandang Neo-liberal lebih bersifat individu dan termasuk jenis kemiskinan absolut, sedangkan kemiskinan Sosial Demokrat bersifat struktural dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi

dikaitkan dengan standar kelayakan hidup. Artinya merujuk pada perbedaan sosial yang diperoleh dari distribusi pendapatan. Kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka nyata, sementara kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan antarpenduduk.

Kemiskinan bukan sekedar masalah pendapatan atau aspek ekonomi semata, melainkan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan tidak sekedar berbicara tentang pendapatan yang rendah, melainkan juga menyangkut masalah perumahan yang buruk, keterbatasan akses pada aset produktif, rendahnya pembangunan manusia, dsb.

Definisi kemiskinan tidak tunggal dan berlaku mutlak kepada semua orang di setiap tempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya karena ketidakadilan dalam bidang multidimensi, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi.

d. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan sebagai kriteria penentu kemiskinan. Menurut Tambunan (melalui Sukijo, 2009: 159) bahwa besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di bawah garis kemiskinan, yang kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi, sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan.

Ada beberapa kriteria kemiskinan, di antaranya :

- 1) Sayoga : ada empat kriteria kemiskinan, yaitu sangat miskin (penghasilan antara 240-360 kg beras), baik di desa maupun di kota; miskin (setara 240-

320/320-480 kg beras); hampir miskin (320-480/480-720 kg beras); dan cukup (setara 480-720 kg beras).

2) Sunyoto Usman : perspektif kultural : tingkat individual ditandai dengan sikap apatisme, pasrah pada nasib, boros, rendah diri; pada tingkat keluarga ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar; pada tingkat masyarakat ditandai dengan tidak terintegrasikan kaum miskin dengan institusi masyarakat secara efektif (Sukijo, 2009: 160).

3) Biro Pusat Statistik

Kriteria garis kemiskinan adalah pengeluaran minimal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengeluaran minimum untuk hidup sehari-hari diukur dengan pengeluaran untuk makanan setara dengan 2100 kalori ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan yang meliputi pakaian, perumahan dan berbagai barang dan jasa.

e. Program Pemerintah untuk Pengentasan Kemiskinan

Program pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan untuk pemberdayaan, antara lain :

- a) IDT (Inpres Desa Tertinggal)
- b) Takesra-Kukesra (Tabungan Kesejahteraan Rakyat-Kredit Usaha untuk Kesejahteraan Rakyat)
- c) PDM-DKE (Program Penanggulangan Dampak Krisis Ekonomi)
- d) JPS-BK (Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
- e) SLT/ BLT (Program Subsidi langsung Tunai/ Bantuan Langsung Tunai)
- f) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Semua bentuk bantuan pemerintah tersebut bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dalam suatu rangkaian program pemberdayaan.

Selain itu ada program untuk masyarakat kota, yaitu P2KP. P2KP adalah program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang memiliki pendekatan integratif, yaitu dilakukan dengan memadukan antara daya fisik,

ekonomi dan sosial. Filosofi program ini adalah pemberdayaan pada proses pembelajaran warga miskin dengan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok miskin, secara lebih konstruktif (Taufik, dkk.1-2).

f. Kearifan Lokal sebagai Pengentasan kemiskinan

Berdasarkan uraian di atas bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, maka masalah penanggulangannya memerlukan partisipasi berbagai pihak, seperti kelompok peduli, para relawan, dunia usaha serta pemerintah daerah. Selain itu kemiskinan dapat dikurangi atau dihindari dengan menggali dan mengembangkan kearifan lokal, karena lestarnya sumberdaya bagi generasi berikutnya (Soerjani dalam Pattinama, 2009:3).

Kearifan lokal mengandung norma dan nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan anti kemiskinan.

g. Kota Layak Anak

1) Dasar hukum Kebijakan

Kebijakan Kota Layak Anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman pembangunan kota melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak. Kota layak anak didasarkan pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang PKDRT; RPJM-D Kota Semarang (perda 12 tahun 2011); dan Peraturan Walikota Semarang No. 20 tahun 2010 tentang kebijakan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kelurahan Ramah Anak (Okky Maria, 2011:14).

b) Pengertian Kota Layak Anak

Kota layak anak adalah strategi pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

Pengembangan model kota layak anak yaitu kota yang di dalamnya telah meramu semangat untuk memberikan perlindungan terhadap sebagai kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena banyak berkembang berbagai perlakuan tak layak terhadap anak seperti kekerasan, kelaparan dan gizi buruk, penyakit endemik, kenakalan anak, eksploitasi anak berupa pelacuran, trafiking, pekerja anak, kondisi traumatis anak pasca konflik wilayah. Di samping itu kota layak anak dipandang krusial untuk menjadi agenda nasional mengingat masih terbatasnya kebijakan pemerintah untuk menyatukan hak anak ke dalam perencanaan pembangunan kota.

c) Tahap Penggarapan Kota Layak Anak

Penggarapan Kota Layak Anak dilakukan secara bertahap, yaitu

- a). Keluarga Ramah anak;
- b). Kelurahan layak anak;
- c). Kecamatan layak anak;
- d). Kota layak anak.

d) Aspek Pendidikan sebagai Kota Layak Anak

Dalam bidang pendidikan Kota Layak Anak ditandai dengan :

- 1) Peraturan daerah tentang pendidikan dasar gratis;
- 2) Persentase anggaran pendidikan dalam APBD;
- 3) Anak 1 sampai 5 tahun mengikuti PAUD dan BKB;
- 4) Rasio institusi pendidikan PAUD dan BKB terhadap anak 1-5 tahun;
- 5) Jumlah anak 7-12 tahun bersekolah;
- 6) Jumlah anak 13-15 tahun bersekolah;

- 7) Rasio lembaga pendidikan dasar anak 7-15 tahun;
- 8) Rasio guru pendidikan dasar (SD dan SLTP) terhadap anak usia 7-15 tahun;
- 9) Promosi pendidikan menengah atas dan kejuruan;
- 10) Anak usia 16-18 tahun memiliki akses pendidikan;
- 11) Rasio lembaga pendidikan di tingkat SMU atau SMK atau MA;
- 12) Rasio guru pendidikan SMU/SMK/MA;
- 13) Penyediaan rute aman sekolah.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Memperoleh gambaran mengenai pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang.
- b. Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kota layak anak di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang.
- c. Menemukan daya dukung pengentasan kemiskinan terhadap terwujudnya kota layak anak di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Aparat kelurahan, dapat menentukan tindak lanjut dengan adanya hasil penelitian ini;
- b. Bagi peneliti, akan menindaklanjuti hasil penelitian ini dalam bentuk pemberian solusi kepada warga sebagai wujud pemberdayaan SDM agar kemiskinan dapat berkurang dan sekaligus untuk mencapai Kota Layak anak.
- c. Bagi IKIP PGRI Semarang, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan kerja sama maupun bahan masukan kepada pemerintah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Populasi warga miskin yang terentaskan di 12 RW. Variabel penelitian mengenai

pengentasan kemiskinan dan kota layak anak. Instrumen yang digunakan berupa : angket, dokumen, wawancara. Analisis datanya dengan analisis interaktif.

C. Hasil Penelitian

Kriteria kemiskinan yang diterapkan di sini adalah kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya karena ketidakadilan dalam bidang multidimensi, baik politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Orang dikatakan miskin jika seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan sekolah dasar. Berdasarkan data warga miskin, 125 warga mereka belum tergolong warga yang terentaskan dari kemiskinan. Mereka masih bergantung pada pemberian, baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Bantuan masih bersifat sinterklas. Pemberian berbagai bantuan kepada keluarga langsung justru berdampak melanggengkan kemiskinan, seperti BLT. Tujuan BLT agar warga mandiri, kenyataannya tidak. Bahkan beberapa warga yang tidak terdaftar sebagai warga miskin kondisinya sekarang masih memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan biaya pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, multidimensi : aspek ekonomi, politik, sosial budaya.

Kelemahan program pemerintah adalah tidak optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin sehingga berorientasi pada 'belas kasihan' dana bantuan hanya dimaknai sebagai dana bantuan cuma-cuma; asumsi warga miskin butuh modal. Konsep ini dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh warga miskin, yang bermuara pada rendahnya tingkat perubahan terhadap cara pandang, sikap, perilaku warga miskin dan warga lainnya dalam memahami akar kemiskinan. Dan program pemberdayaan lebih dimaknai secara parsial, salah satu aspek, program pemberdayaan secara terpadu tidak terintegrasi.

Usaha swadaya masyarakat yang mulai berjalan hanya dengan bertumpu pada keterampilan yang dimiliki, nampaknya tidak berdampak positif atau perubahan itu sangat lambat, kenyataannya usaha itu belum memberikan hasil yang memadai, mereka masih butuh subsidi bahan pokok. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan perlu adanya pendidikan kewirausahaan yang berguna mengubah sikap mental ketergantungan serta mengembangkan etos kerja sehingga tumbuh kemandirian.

Program pendidikan yang demikian saja perlu pendampingan sampai membantu pendistribusian hasil usaha. Hal ini dilakukan karena mereka tidak punya akses aset produktif.

Istilah kota layak anak belum dimiliki oleh banyak warga bahkan aparat kelurahan juga belum tahu. Namun demikian dapat dilihat dari pendapat warga tentang pendidikan. Warga yang kebutuhannya belum terpenuhi secara maksimal pun sudah menilai pentingnya pendidikan anak. Dengan berbagai usaha mereka akan membekali anaknya dengan pendidikan untuk mempersiapkan masa depannya. Anak difasilitasi untuk belajar belum saatnya bekerja. Walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga anak juga dilibatkan dalam bekerja walaupun paruh waktu, selain untuk dengan bekerja akan membantu perekonomian keluarga juga melatih anak mandiri. Namun demikian, dalam kehidupan masyarakat indikator perwujudan keluarga layak anak sudah tertanam pada warga, walaupun belum sepenuhnya. Ketika masih ada pendapat yang menyetujui anak usia sekolah untuk bekerja, hal ini belum mewujudkan keluarga layak anak. Hal ini nantinya dapat mendukung perwujudan kelurahan yang layak anak.

Hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas sekolah, tersedianya guru, dana pendidikan, tersedianya lingkungan yang ramah, masih belum seperti yang dituntut secara ideal, berdasarkan dokumen dari kelurahan, jumlah murid peraturan dari mendiknas 28 siswa dalam satu kelas, sementara jumlah murid dalam satu kelas SD antara 40 sampai dengan 50 siswa. jumlah guru sekolah lanjutan masih kurang, 1 SMP guru hanya 12 orang, 1 SMA guru 30 dan 1 SMK guru 15 dan MAN 40 guru. Berdasarkan jumlah guru jelas masih kurang misalnya 1 SMP dengan satu kelas, cukupkah dengan 12 guru? Dari SDM ini dapat dilogikakan bahwa fasilitas pendukung masih kurang. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang belajar masih belum memadai. Hal demikian akan mendukung terciptanya kota layak anak.

Kaitannya dengan kondisi warga miskin yang terentaskan di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang belum terwujud, maka kelurahan (kota) layak anak juga belum terwujud. Dengan demikian kondisi perekonomian warga akan menentukan daya dukung terwujudnya kota layak anak, yang dalam hal ini tidak sekedar terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan dasar, namun

harus diikuti kesadaran akan pentingnya pendidikan anak, pelayanan pada anak agar mendapat fasilitas yang memadai dalam belajar serta mendapat kenyamanan dalam belajar sehingga hasil yang optimal akan diperoleh.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan :

- a. Di Kelurahan Pedurungan Kidul, usaha pengentasan kemiskinan belum berhasil, karena kriteria miskin masih beragam. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian secara seksama dengan kriteria yang jelas tentang definisi miskin.
- b. Perwujudan kota layak anak belum berhasil karena aparat dan warga belum tahu istilah kota layak anak. Kondisi warga miskin lebih berpikir untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Walaupun demikian sudah ada kesadaran akan pentingnya pendidikan anak, pemberian fasilitas belajar, perhatian terhadap belajarnya, pelayanan anak dalam belajar demi masa depan.
- c. Daya dukung pengentasan kemiskinan terhadap perwujudan kota layak anak di Kelurahan Pedurungan Kidul belum diketahui secara jelas karena istilah kota layak anak belum diketahui. Di samping itu hasil pengentasan kemiskinan belum dapat diketahui karena kriteria miskin masih bias. Jika dilihat dari kriteria pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan sekolah dasar, maka warga miskin belum terentaskan. Namun indikator ke arah perwujudan kota layak anak sudah ada pada warga, mereka ingin memberi bekal pendidikan pada anaknya untuk masa depannya, agar mereka memiliki kepribadian, bermoral, dan mandiri.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh direkomendasikan kepada pemerintah agar membuat program bantuan yang tidak bersifat "Cuma-Cuma" namun program yang memberi bekal pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan sehingga mereka mendapat bekal untuk dapat dikembangkan secara mandiri atau program kewirausahaan.

Kepada warga yang telah peduli terhadap warga miskin agar terentaskan, juga perlu kerja sama dengan aparat setempat agar usahanya dapat berhasil dengan

memberi keterampilan bukan menawarkan keterampilan yang dimiliki kemudian difasilitasi dengan modal. Pada kenyataannya warga belum memiliki keterampilan sebagaimana yang kita harapkan, maka pemberian modal kepada yang memiliki kemauan atau dipandang memiliki keterampilan belum berhasil.

Hasil penelitian ini dapat terwujud berkat bantuan banyak pihak, pejabat di tingkat kelurahan, RW, sebagian warga. Demikian juga tim peneliti yang telah berusaha mengumpulkan data dan bekerja sama menyelesaikan penelitian ini, maka kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan kerja samanya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas, 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Depdiknas
- Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Edisi Terjemahan oleh Tjetejp Rohendi Rohidi)*, Jakarta : UI Press.
- Hadad, Ismid. 2003. *Pengentasan kemiskinan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Pola Produksi yang Ramah Lingkungan*. Makalah Seminar. Bali
- Moleong, Lexy. J., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Pusat Kajian Gender.2008. *Kajian Kota Layak Anak Kota Jambi*.Universitas Jambi
- Suharta. 2007. Konsep dan Strategi Pengentasan kemiskinan menurut perspektif Pekerjaan Sosial. (<http://www.policy.hu/suharto/modul/makindo/13htm>).
- Sukijo.2009. 'Strategi Pemberdayaan Pengentasan kemiskinan pada PNPM Mandiri'. *Cakrawala Pendidikan*. Juni 2009,Th. XXVIII No. 2.
- Taufik, Ahmad, Dewi Erowati, dan Wijayanto. 2009.*Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal*(<http://www.foxitsoftware.com>.)
- Pattinama, Marcus J. 2009. 'Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal'*Makara, Sosial Humaniora, Vol.13.No.1, Juli 2009*.

